**BAB I**

**PENDAHULIAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Globalisasi dan industrialisasi yang terjadi saat ini merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi Bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebagai upaya untuk hidup sejajar dan berdampingan dengan masyarakat dunia lainnya. Globalisasi dan industrialisasi disatu sisi membuka peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan persaingan yang semakin ketat. Tuntutan diera global adalah ”keunggulan kompetitif *(competitf advantage)”* atas semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri nasional.

Pendidikan nasional berawal pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Pendidikan menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, mampu melihat peluang kerja, dan mampu mengembangkan diri di kemudian hari.

Pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorentasi pada dunia industri dengan penekanannya pada pendekatan pembelajaran yang didukung oleh Spektrum yang sesuai. Dunia industri yang merupakan sasaran dari proses dan hasil pembelajaran sekolah kejuruan mempunyai karakter dan nuansa tersendiri. Oleh karena itu sekolah menengah kejuruan dalam proses pembelajaran kabupaten/kota bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan kejuruan dituntut mampu menyiapkan tenaga kerja terampil yang dapat mengisi keperluan pembangunan, mengubah status siswa dari status beban masyarakat dan bangsa menjadi aset bangsa, menciptakan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, merupakan suatu Sistim pendidikan terpadu yang mencakup semua jenis, satuan, jalur, jenjang, dan kegiatan pendidikan yang bekaitan satu sama lain, ditata secara sistimatis sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilakukan secara terpusat. Semua kebijakan mulai dari Spektrum sampai pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh pusat.

Kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia semakin meningkat, khususnya pada bidang teknologi dan industri. Melalui pelaksanaan program Praktik Kerja Industri diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas serta profesional pada bidang pekerjaannya masing-masing. Praktik Kerja Industri merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang merupakan perpaduan antara pendidikan disekolah dan pendidikan pelatihan keahlian dalam dunia kerja/dunia industri. Praktik Kerja Industri akan meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa secara langsung dalam dunia kerja/ yang memerlukan pembelajaran dan keahlian intensif.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dalam penjelasannya disebutkan “Pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Uraian tersebut sesuai dengan tujuan khusus Spektrum (2009:8), yaitu: 1) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; 2) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karier, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; 3) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri dikemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang yang lebih tinggi; dan 4) membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan lulusan SMK kabupaten/kota lebih terampil dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Bagi lembaga pendidikan kejuruan mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah salah satu kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang siap untuk diterjunkan ke dunia pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan kejuruan kabupaten/kota memprioritaskan sistim pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan yang benar-benar profesional, memiliki etos kerja, disiplin dan tetap menjunjung tinggi budaya bangsa.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (*baca*: Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia) melalui Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan mengembangkan dan melaksanakan pendekatan Praktik Kerja Industri pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33/U/1997 (Depdiknas, 2007:4). Identifikasi dan seleksi Spektrum, pengembangan materi Spektrum, dan pengembangan paket-paket yang didasarkan atas kompetensi dan pengajaran individual adalah sangat penting. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Spektrum SMK, perlu dilakukan identifikasi dan pemilihan materi pengajaran yang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri (*Link and Match*). Selain itu, kabupaten/kota dilakukan sinkronisasi mata diklat secara terpadu yang disesuaikan dengan tuntutan dunia usaha/industri melalui sinkronisasi paket-paket belajar atau modul dan praktik.

Pengembangan Spektrum dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Spektrum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sistim pendidikan nasional. SMK menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) berbagai program keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program keahlian tersebut dikelompokkan menjadi bidang keahlian sesuai dengan kelompok bidang industri/usaha/profesi.

Penerapan kebijaksanaan *link and match* pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Hal ini sebagai usaha untuk mencari titik temu antara dunia pendidikan sebagai produsen dan dunia kerja/industri sebagai konsumen. Menurut Sanjaya (2009:3), tujuan gerakan *link and match* adalah “untuk mendekatkan pemasok (*supplier*) dengan mutu sumber daya manusia, terutama yang berhuhungan dengan kualitas ketenagakerjaan”. Sedangkan konsep dasar penerapan Praktik Kerja Industri itu sendiri adalah penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan secara sistimatis dalam kegiatan pendidikan di sekolah dengan kegiatan pendidikan (praktik) di dunia industri. Sebagai realisasi dari kebijakan tersebut, maka dicanangkan konsep Praktik Kerja Industri.

Salah satu kebijakan pendidikan kejuruan yang cukup menonjol adalah pada masa Kabinet Pembangunan VI, Menteri Pendidikan Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro memperkenalkan kebijakan *“link and match”.* Kebijakan ini mengimplikasikan wawasan sumber daya, mutu, keunggulan, profesionalisme dan ekonomi dalam pendidikan kejuruan. Sehingga menghasilkan suatu model pendidikan kejuruan yang kita kenal dengan Praktik Kerja Industri sebagai sebuah bentuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan yang memadukan secara sistimatik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program belajar melalui kegiatan bekerja langsung pada bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai penguasaan kemampuan tertentu (Dedi Supriadi, 2002:242).

Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan 2008 berlaku sejak tahun pelajaran 2008/2009 pada kelas X. Lulusan SMK dituntut oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini Dinas Pendidikan mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya. Keberhasilan SMK dalam menyelenggarakan pendidikannya tidak dapat diukur dari jumlah siswa yang lulus maupun berprestasi, akan tetapi seberapa besar lulusan SMK tersebut dapat tersalurkan untuk mengisi dunia kerja. Untuk mendukung keberhasilan program Praktik Kerja Industri, maka dibentuklah majelis pendidikan kejuruan baik tingkat nasional (MPKN), propinsi (MPKP) maupun majelis sekolah (MS). Salah satu capaian dalam program ini adalah keluarnya SKB Mendikbud dan Ketua Umum Kadin Indonesia pada tanggal 17 Oktober 1994 No. 0267a/U/l 994 dan No. 84/KU/X/1994. Kehadiran MPKN telah secara efektif menggerakkan berbagai badan, organisasi, perusahaan dan asosiasi profesi dalam mendukung program Praktik Kerja Industri, sementara di tingkat mikro (sekolah) dalam majelis sekolah (MS) industri yang terlibat telah berperan aktif sebagai mitra SMK dalam keseluruhan kegiatan SMK.

Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia telah diarahkan pada tujuan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka pelaksanaan Praktik Kerja Industri pada prinsipnya merupakan kebijakan publik dalam bentuk pendidikan keahlian profesional yang diwujudkan dengan mensinkronkan antara program pendidikan di SMK dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung pada dunia kerja.

Banyak pihak yang masih menyangsikan program yang dilaksanakan di SMK sudah sesuai dengan kondisi nyata di dunia kerja karena belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Ketidaksesuaian *(mismatch)* ini telah menjadi isu utama yang menyebabkan polemik berkepanjangan antara dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan. Direktorat Pembinaan SMK Ditjenmandikdasmen Kemendiknas telah melakukan beberapa upaya dalam memperbaiki mutu pendidikan menengah kejuruan dengan melakukan penambahan pembangunan fasilitas fisik bangunan, pengadaan peralatan praktik, pengadaan dan penataran guru, dan peningkatan pengembangan Spektrum.

Kerjasama kemitraan dalam bentuk sinkronisasi program yang dibangun antara SMK dan dunia kerja diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak khususnya SMK dalam mempersiapkan dan mengembangkan pembelajaran yang diharapkan oleh dunia kerja, dan dunia kerja mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang di butuhkan. Mutu lulusan Pendidikan sangat erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain spektrum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, alat bantu dan bahan, manajemen, sekolah, lingkungan sekolah .

Persoalan sinkronisasi hingga saat ini menjadi isu yang cukup hangat, .secara lebih spesifik, persoalan sinkronisasi yang berkaitan dengan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Konteks sinkronisasi dalam komunikasi digunakan sebagai sebuah ukuran (*measurement*), dimana ukuran ini dikenakan kepada sebuah kinerja Sistim. Dengan kata lain, ukuran ini biasanya datang dari sisi luar sebuah Sistim, sebab itu dapat pula disebut sebagai ukuran eksternal. Secara konseptual, ukuran sinkronisasi eksternal memiliki kelemahan. Dalam konsep sinkronisasi, sebuah program pendidikan dianggap sinkron jika sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian ini kemudian ditetapkan sebagai sebuah ukuran kuantitatif yang tetap.

Fakta di lapangan yang disampaikan Cujiningham, Dawes and Bennet (2004) yang mengindikasikan keadaan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kejuruan berjalan dengan programnya sendiri, di sisi lain dunia kerja/industri dan asosiasi profesi sering mengeluh bahwa kualitas tenaga kerja (lulusan) belum memenuhi tuntutan keahlian (kompetensi) yang diharapkan. Gejala *“mismatch”* seperti ini pada akhirnya melahirkan lulusan *“underqualified”,* keadaan seperti ini cukup lama terjadi, bahkan sampai saat ini. Untuk itu kerjasama kemitraan antara SMK dan dunia kerja kabupaten/kota dibangun dengan kuat agar terdapat saling pengertian dan saling membantu khsuusnya dalam melakukan *share resources* yang dimiliki oleh masing-masing.

Kesenjangan antara harapan dan capaian SMK khususnya dalam menghasilkan lulusan yang diharapkan mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana harapan dunia kerja terus menjadi tantangan pendidikan kejuruan. Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah kejuruan adalah keterbatasan para pengelola dalam menguasai masalah, sarana dan fasilitas dan mengintegrasikannya dalam kebijakan pelaksanaan pendidikan. Ketidakpercayaan dan keraguan dunia kerja terhadap penguasaan teknologi siswa SMK menjadi salah satu hambatan pelaksanaan Praktik Kerja Industri. Hal ini didasari pada kondisi minimnya peralatan praktek yang mutakhir di SMK yang dianggap sebagai rendahnya kemampuan praktik yang dimiliki oleh lulusan SMK selama studi di sekolah.

Permasalahan tersebut dapat diminimalisir melalui kerjasama sinergis antara SMK dengan dunia kerja. Bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri adalah mensinkronkan dan menggembangkan komunikasi yang berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan industri serta kebutuhan kompetensi industri agar dapat sinkronisasi dengan program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK). Namun program yang dilaksanakan di SMK belum sesuai dengan kondisi nyata di dunia kerja. Disinilah letak peran dan fungsi manajemen melakukan analisis kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan yang dilandasi oleh kemampuan leadership yang kuat dalam melakukan analisis sehingga menghasilkan kebijakan berupa rumusan strategis yang dapat dijabarkan dalam program dan kegiatan. Peran manajemen mutu dalam melakukan analisis khsususnya dalam menilai setiap langkah manajerial baik selama perencanaan *(plan),* pelaksanaan *(do),* evaluasi *(check)* hingga tindak lanjut *(act)* dan perbaikan yang diharapkan dapat berkesinambungan.

Beberapa permasalahan yang menyertai ketidaksesuaian (*mismatch*)lulusan SMK dengan kebutuhan dunia kerja diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak sesuai dengan kondisi dunia kerja (Sugiono, 2003) kelemahan kepemimpinan pendidikan kejuruan dalam pengelolaan program pendidikan dan pelasanaan kebijakan program peningkatan mutu SMK, khususnya terkait dengan visi, misi, dan profesionalisme, selanjutnya implementasi program dan evaluasi program pengembangan mutu pendidikan yang belum optimal (Basuki Wibawa, 2005:6). Perbedaan yang mendasar antara Sistim nilai yang berlaku di sekolah dengan yang berlaku di dunia kerja, maka sekolah hendaknya benar-benar mempersiapkan siswanya sebelum masuk dunia kerja. Persiapan tersebut meliputi pengetahun kerja, keterampilan kerja, sikap/budaya kerja, dan harus mencari informasi tentang kebutuhan akan industri pasangannya tentang kemampuan dasar kerja yang harus dikuasai siswa sebelum diterjunkan dalam praktik di dunia kerja.

Sangat disadari bahwa, mempersiapkan siswa  yang memiliki berbagai kompetensi pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyiapkan siswa  yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi. Dengan memiliki kompetensi semacam itu, siswa  diharapkan mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala macam akibat dan adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka pelaksanaan program Praktik Kerja Industri sangatlah penting, khususnya bagi perkembangan kompetensi lulusan dan umumnya dalam perkembangan pembangunan pendidikan yang berdampak langsung dalam mendorong perekonomian di Indonesia.

Penerapan kebijakan Praktik Kerja Industri yang menggambarkan perubahan mendasar dari model penyelenggaraan pendidikan sebelumnya (*schooling system*) ke arah Sistim ganda (*dual responsibility*), dimana perusahaan atau institusi kerja lainnya menjadi Institusi Pasangan (IP) dari SMK dalam pelaksanaannya merupakan bagian integral dari Sistim penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Perubahan ke arah Sistim ganda menuntut pihak SMK untuk melakukan sinkronisasi penyelenggaraan program Praktik Kerja Industri agar mampu memberikan layanan pendidikan secara optimal dalam memenuhi dinamisasi kebutuhan pasar kerja. Hal ini didasari pada teori Prosser yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan akan efektif jika peserta didik dilatih dengan peralatan, kebiasaan, dan lingkungan yang akan mereka hadapi nantinya jika mereka lulus dan bekerja.

Alasan dilakukannya sinkronisasi program Praktik Kerja Industri Jurusan Teknik Bangunan SMK Negeri di Kota Makassar, karena berdasarkan pengamatan dan pemantauan penulis pada pelaksanaan di industri dan setelah siswa melaksanakan Praktik Kerja Industri, permasalahan yang dirasakan oleh sekolah dan siswa dalam pelaksanaan Praktik Kerja Industri, antara lain: (1) keragaman kesiapan dan tingkat kemajuan SMK, (2) keragaman program Praktik Kerja Industri di SMK Negeri di Kota Makassar yang belum seiring dengan keragaman perkembangan industri, (di Kota) guru pembimbing belum berfungsi secara optimal di sekolah dan di industri, (4) kesulitan menjalin kerja sama dengan institusi pasangan yang tergolong cukup besar, (5) rendahnya manajemen pengelolaan pelatihan siswa oleh industri terutama pada industri kecil, (6) instruktur / pembimbing di industri banyak yang belum memenuhi persyaratan serta belum berperan secara efektif karena faktor tingkat pendidikannya, (7) masih banyak siswa yang mencari sendiri industri tempat pelaksanaan Praktik Kerja Industri, (8) kurangnya waktu yang disediakan Majelis Sekolah untuk berkoordinasi dengan industri   (9) kurang disiplin dan rendahnya kepedulian siswa terhadap keselamatan kerja, (10) tidak berimbangnya antara jumlah SMK dan jumlah dunia usaha/industri dan, (11) sekolah belum menjadikan industri sebagai pengajar tamu untuk mensinkronkan tugas dan pekerjaannya terhadap Spektrum yang digunakan sekolah, sehingga masih terdapat  ketidaksesuaian penjabaran program Praktik Kerja Industri dengan apa yang dilaksanakan siswa di industri.

Sementara permasalahan yang dihadapi oleh industri antara lain: (1) belum memiliki struktur jabatan dan keahlian yang mantap, terutama pada industri kecil dan menengah, (2) belum ada perencanaan alokasi biaya untuk pengembangan pendidikan, (di Kota) belum dimilikinya persepsi yang sama tentang pelaksanaan dan keuntungan program Praktik Kerja Industri bagi industri dan, (4) kurangnya kesadaran tentang peningkatan keefektifan, efisiensi, dan kualitas dalam pelaksanaan pelatihan di industri bagi para instruktur. Pemelajaran Berbasis Produksi (*production-based learning/training*) adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi atau menggunakan proses produksi sebagai media pemelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan terutama untuk memperkenalkan peserta didik dengan iklim kerja yang nyata.

Pelaksanaan sinkronisasi Spektrum hususnya Jurusan Teknik Bangunan SMK Negeri di Kota Makassar, langkah yang dapat ditempuh adalah menjadikan institusi pasangan (industri) sebagai pengajar tamu di sekolah, sekolah dan industri bersama-sama mendeskripsikan materi bahan ajar yang akan diberikan kepada siswa, atau guru pembimbing mengidentifikasi deskripsi tugas (*job description*) pada masing-masing industri pasangan, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh dalam penjabaran Spektrum Teknik Bangunan SMK Negeri di Kota Makassar sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini, mengingat Spektrum SMK merupakan perangkat pendidikan yang dinamis.

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu upaya dari lembaga pendidikan dan dunia industri untuk dapat bersama-sama mensinkrokan program pendidikan khususnya pelaksanaan program Praktik Kerja Industri, agar tujuan dunia usaha dan lembaga pendidikan (SMK) dapat tercapai dan selaras. Bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri adalah mensinkronkan dan mengembangkan koordinasi yang berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan industri serta kebutuhan kompetensi industri agar dapat disinkronkan dengan program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK),

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah sinkronisasi program Praktik Kerja Industri Spektrum Teknik Bangunan pada SMK Negeri di Kota Makassar dengan Dunia Usaha Dunia Industri dilihat pelaksanaan program?
2. Bagaimanakah prosedur sinkronisasi program Praktik Kerja Industri Spektrum Teknik Bangunan pada SMK Negeri di Kota Makassar dengan Dunia Usaha Dunia Industri dilihat dari tujuan, isi, struktur, strategi dan evaluasi?
3. **Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Sinkronisasi Program Praktik Kerja Industri Spektrum Teknik Bangunan pada SMK Negeri di Kota Makassar dilihat dari pelaksanaan dengan Industri.
2. Untuk mengungkapkan prosedur sinkronisasi program Praktik Kerja Industri Spektrum Teknik Bangunan pada SMK Negeri di Kota Makassar dilihat dari tujuan, isi, struktur, strategi dan evaluasi Spektrum Dunia Usaha/Dunia Industri
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
2. Menambah hasanah ilmu pengetahuan pengelolaan spektrum Pendidikan Teknologi Kejuruan dan bidang administrasi pendidikan pada SMK Negeri di Kota Makassar.
3. Merupakan data dasar untuk pengembangan penelitian yang lebih kompleks yang berhubungan dengan dunia usaha kaitannya dengan spektrum Teknik Bangunan di SMK .

2.  Manfaat Praktis

1. Kemendikbud Jakarta, untuk menata pendidikan kejuruan sehingga luaran/tamatam SMK dapat diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan adanya *link and match*.
2. Diknas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan, untuk membina SMK yang ada di Sulawesi Selatan hususnya Jurusan Teknik Bangunan agar luaran/lulusan SMK dapat diterima di Dunia Usaha dan Dunaia Industri.
3. Diknas Pendidikan Kota Makassar, sebagai bahan masukan sekaitan dengan sinkronisasi pelaksanaan program Praktik Kerja Industri Spektrum Teknik Bangunan dengan Industri pada SMK di Kota Makassar, terkait dengan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan kejuruan lingkup Kota Makassar.
4. Kepala Sekolah/Komite Sekolah, sebagai bahan masukan berharga kepada pimpinan dalam upaya merumuskan pengembangan dan peningkatan kualitas lulusan pada SMK Negeri di Kota Makassar Spektrum Teknik Bangunan.
5. SMK Negeri dan Swasta sejenis, sebagai bahan acuan dalam melakukan sinkronisasi Spektrum Jurusan Teknik Bangunan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan.
6. Siswa, meningkatnya keterampilan, keahlian, dan kompetensi profesional yang sesuai dengan kebutuhan pasar / industri relevan.
7. Peneliti, sebagai bahan literatur guna keperluan pelaksanaan penelitian sejenis.